

IMPEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Muhamad Sobri Ardika

Email: muhamad.sobri1293@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Regional governments have great authority in exploring their own financial resources to be able to carry out regional autonomy that is broad, real and responsible. One of the financial sources that can be developed by local governments is local taxes which are a component of local revenue (PAD). Pekanbaru City where as the capital of Riau Province which is developing towards a metropolitan area has active population mobility both in various trade and industrial businesses, so that the tax sector is a potential source of income for regional development, especially advertisement tax, but in reality in recent years the tax realization advertisements have not reached their targets, therefore it is necessary to implement appropriate advertisement policies in increasing local revenue, especially advertisement tax. The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of advertising tax policies in increasing regional own-source revenue in Pekanbaru City and to determine the factors that influence the implementation of advertisement tax policies in increasing regional own-source revenue in Pekanbaru City. The urgency of this research is that it is hoped that it can be a solution and input for Bapenda in implementing advertising policies in Pekanbaru City and increasing regional income for better regional development. The research method used is qualitative. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that the implementation of the Advertising Tax Area Original Revenue Increase Program in Pekanbaru City had been carried out properly with reference to regional tax regulations and regional income increase programs compiled and determined by the Pekanbaru City Regional Revenue Agency, regarding the size and objectives that had been contained in the policy. and programs, resources that have been set and provided by the City government, a clear bureaucratic structure, inter-line communication and a conducive environment to realize the realization according to the targets set, the Implementation of the Advertising Tax Area Original Income Increase Program in Pekanbaru City is in the category enough done

Keywords: Implementation, program, Increasing Regional Original Income, taxes, billboards

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga daerah. Kebutuhan pemerintah terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit sehingga pentingnya memperhatikan dan menggali berbagai sumber pendapatan terlebih lagi memiliki potensi yang dapat diandalkan baik dari segi pemasukan maupun berkelanjutan, tiap daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam hal ini pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek yang mana substansinya harus saling berkaitan.

Salah satu sumber keuangan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). Dengan menggali secara optimal sumber-sumber pajak daerah diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat meningkat dan ketergantungan daerah kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat semakin berkurang atau memunculkan kemandirian daerah agar tidak selalu bergantung terhadap pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan daerah.

Kota Pekanbaru dimana sebagai ibukota Provinsi Riau yang sedang berkembang menuju kawasan metropolitan memiliki mobilitas penduduk mulai aktif baik dalam berbagai usaha perdagangan dan perindustrian, sehingga sektor pajak

menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi pembangunan daerah, seperti yang di ketahui dari UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa lingkup Kabupaten/kota memiliki 11 jenis pajak yang dapat di pungut dan di jadikan pendapatan asli daerah.

Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru adalah pajak reklame, dari waktu ke waktu ada kecenderungan peningkatan dalam kebutuhan akan reklame bagi pihak-pihak yang memerlukan promosi untuk barang dan jasa yang ditawarkan. Reklame pun terus-menerus mengalami inovasi agar bisa memikat para target pasar dari pengiklan, tak terlepas pula pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur terkait penyelenggaraan pajak reklame pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yang mana pada pasal 1 menjelaskan bahwa reklame adalah alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Dari latar belakang yang dijelaskan bahwa penerapan atau implementasi program Bapenda Kota Pekanbaru belum dapat menyelesaikan permasalahan pencapaian target yang ditetapkan seperti belum memenuhi aspek implementasi program yang baik yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan SOP dari program tersebut, dari hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran daripada wajib

pajak akan pembayaran pajak reklame, sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya, lalu kinerja pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penyelenggaraan pemungutan pajak reklame yang mana kesemua fenomena yang terjadi terkait pada aspek atau bagian faktor pendukung implementasi program. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Impementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kota Pekanbaru”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Impementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Impementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa rumusan permasalahan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis impementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat impementasi kebijakan pajak reklame dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah yang ada di jurusan Ilmu Administrasi Publik
 - b. Dapat dipergunakan sebagai masukan bagi peneliti lain
2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian tersebut diantaranya adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu Administrasi publik. Selain itu sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan masalah yang sama.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumbangan pemikiran khususnya masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memningkatkan pajak reklame

1.5. Konsep Teori

1.5.1. Konsep Konsep Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefenisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Pandangan Van Meter dan Van Horn tersebut menjelaskan bahwa badan-badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari undang-undang sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain, sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan, dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. (Indiahono, 2009:38).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia tersebut, sumber daya-sumber daya lain perlu diperhitungkan juga antara lain sumber daya financial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplemtasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi. (Indiahono, 2009:39).

4. Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2008:143). Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran. (Indiahono, 2009:39).

5. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya seberapa sering rapat rutin diadakan, tempat dan waktu. (Indiahono, 2009:39).

6. Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi dan turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan dari pelaksanaan dan

mengakibatkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan.

1.5.2. Pajak Daerah

Pajak menurut **Adriani (dalam Sutedi, 2013:2)** adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terhutang wajib pajak membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak yang lain menurut **Prasetyono (2012:11)** adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut **Sutedi (2013:2)** pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan peraturan dengan tujuan kesejahteraan umum, salah satu kewenangan pemungutan kepada daerah untuk pembangunan daerah adalah pajak daerah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah badan yang diberi wewenang dalam melaksanakan pemungutan pajak

daerah, salah satunya pemungutan pajak reklame di Kota Pekanbaru

1.6.2. Informan Penelitian

Untuk informan penelitian menggunakan purpose sampling. Dimana yang diambil untuk menjadi informan adalah:

- a. Bidang pajak daerah lainnya;
- b. Sub Bidang pajak reklame;
- c. Staf bidang pajak daerah lainnya;
- d. Wajib pajak reklame.

Dalam penelitian ini mereka dijadikan key Informan. Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan karena mereka merupakan orang yang berhubungan langsung dengan pelaksana kebijakan pajak reklame.

1.6.3. Jenis data dan Sumber data

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang diambil atau data yang diperoleh langsung dari informan penelitian berupa informasi yang relevan dengan factor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pajak reklame, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari:

- Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah pelaksanaan kebijakan pajak reklame
- Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan pajak reklame.
-

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data dalam penelitian ini meliputi:

1. laporan-laporan pelaksanaan pajak reklame.
2. Struktur organisasi,

3. Uraian jabatan, tugas dan fungsi,
4. sejarah singkat kantor Badan Pendapatan Daerah dan Data pendukung lainnya

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi dengan mempelajari sumber data tertulis untuk memperoleh data primer dan sekunder mengenai penelitian yang dilakukan
2. Wawancara
Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dan keterangan seperlunya yang dipandang penting dengan cara menadakan Tanya jawab langsung dengan informan penelitian, dengan cara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
3. Studi Kepustakaan
Adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang yang berhubungan dengan masalah penelitian yang di bahas.

1.7. Hasil Dan Pembahasan

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam pelaksanaan program pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya di bidang pajak reklame terdapat 5 (lima) program yang menjadi tugas pada bidang pajak daerah di bidang reklame, program tersebut dimulai pada pendataan objek dan subjek pajak dan pendaftaran, kemudian melakukan penyuluhan kepada subjek

pajak reklame, penagihan pajak dan melakukan pemuktahiran data, agar seluruh data mengenai objek pajak dan subjek pajak lengkap dan menjadi acuan penyusunan program kedepannya.

Pembuatan program yang lebih flexibel atau adaptasi dengan lingkungan sekarang ini akan lebih mempermudah dalam pelaksanaan program dikarenakan penerapannya akan memperhatikan aspek-aspek yang ada dilikungan penerapa program baik itu subjek dan objek pajak, lingkungan sosial ekonomi serta budaya. (Chayadi, 2014) sehingga penerapannya akan dapat lebih di terima oleh subjek pajak reklame. Program pengelolaan pendapatan daerah yang lebih flexibel bukan hanya mengedepankan aspek pendekatan yang cenderung kaku tetapi lebih melakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

2. Sumber daya

Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program pengelolaan pendapatan daerah pajak reklame mendapatkan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sehingga seharusnya dalam kegiatannya tidak ada faktor penghambat dari segi kesediaan sumber daya organisasi dan pencapaian tujuan dari program tersebut. Sumber daya yang di sediakan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk menunjang program peningkatan pendapatan asli daerah telah di sediakan dengan baik, mulai dari sumber daya pelaksana, anggaran dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga seharusnya tidak ada hambatan dari internal organisasi dalam pelaksanaan program ini.

Tentunya dalam pelaksanaan program harus mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksana program tentunya hal ini juga sebagai

aspek pendorong untuk keberhasilan program, kemudian untuk anggaran yang disediakan pada setiap programnya tentu saja sangat menentukan dalam pelaksanaan programnya. (Chayadi, 2014) tetapi diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum memadai. maka dari itu tentunya pemerintah daerah Kota Pekanbaru Khususnya Bapenda harus menyediakan sumber daya manusia dari segi jumlah, anggaran yang sesuai dengan jumlah program dan kegiatan untuk menyediakan fasilitas pendukung operasional maupun fasilitas lainnya.

3. Karakteristik agen pelaksana

Menurut program yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan daerah ditetapkan beberapa program. tetapi seperti yang terlihat pada data realisasi dan target masih tidak sesuainya antara target dan realisasi khususnya pajak reklame maka dari itu pihak Badan Pendapatan daerah harus menggunakan pendekatan yang lebih intensif dan persuasif.

Dalam pelaksanaan program pengelolaan pendapatan daerah Badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru menjadi pihak penanggung jawab. Dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak reklame yang merupakan salah satu bidang pajak yang cukup tinggi kontribusinya untuk pajak daerah, maka dari itu dalam pelaksanaannya seharusnya didukung oleh struktur birokrasi yang efektif dan rentang kendali yang pendek. Struktur birokrasi yang efektif dan rentang kendali yang pendek akan memudahkan komunikasi yang lancar selain dari komunikasi internal maka komunikasi eksternal dalam pelaksanaan program tersebut

menjadi hal yang penting sebagai penyebaran informasi.

4. Sikap para pelaksana

pihak pemerintah daerah sangat mendukung peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak reklame di ketahui bahwa masyarakat atau subjek pajak reklame juga sangat mendukung program pengelolaan PAD tersebut, tetapi memang terdapat sebagian subjek pajak yang masih kurang peduli dan tidak ikut berpartisipasi dalam membayar pajak dan juga banyak tunggakan dari subjek pajak sehingga target dan realisasinya belum tercapai sepenuhnya, maka dari itu sangat perlu penyuluhan, himbauan atau sosialisasi serta penindakan yang lebih tegas dari pihak pemerintah daerah, untuk memsukkseskan program pengelolaan pajak daerah.

Selain itu karakteristik pelaksanaan yang harusnya memiliki sikap tegas, disiplin dan mengerti dengan kondisi lapangan menjadi aspek dan faktor penentu dari penyebaran dan pelaksanaan program. (Yahya, 2014). sehingga perlu penyuluhan, himbauan, sosialisasi serta penindakan yang tegas oleh badan pendapatan daerah untuk merubah sikap masyarakat yang tidak peduli tersebut, maka itu hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi Bapenda Kota Pekanbaru untuk merubah sikap masyarakat menjadi peduli akan tertib pajak daerah untuk pembangunan daerah yang lebih baik.

5. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kebijakan Program Peningkatan Pendapatan daerah khususnya pajak reklame ialah himbauan kepada masyarakat atau subjek pajak baik secara langsung

maupun tertulis seperti pamflet dan baliho sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan, Dalam melaksanakan program pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak reklame melalui penyuluhan dan pelayanan informasi, penyuluhan yang dilakukan berupa sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak secara langsung kemudian pelayanan informasi melalui pemberitaan hal terkait upaya-upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah.

Komunikasi atau sosialisasi menjadi penting bagi sebuah program setelah ditetapkan, komunikasi berupa pemberian informasi bagi isi kebijakan maupun tujuan dari kebijakan selain untuk melaksanakan kebijakan tersebut tentu untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut khususnya peningkatan pendapatan daerah yang mana tujuannya ialah untuk meningkatkan ketaatan dari wajib pajak dan juga pembangunan daerah Kota Pekanbaru.

6. Lingkungan

Program pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru pihak pemerintah kota tentu ingin memanfaatkan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, sehingga tujuan dari kebijakan bukan hanya kepada pembangunan daerah tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat dari pembangunan hasil pajak daerah. dikarenakan kebijakan atau program yang dibuat harus menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada sehingga outputnya ialah terciptanya lingkungan yang mendukung kebijakan, peningkatan ekonomi masyarakat.

Penentuan program pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak reklame ialah lingkungan salah satu indikator dalam penentuan program

yang akan dilakukan, dikarenakan kebijakan atau program yang dibuat harus menyesuaikan kondisi lingkungan yang ada sehingga outputnya ialah terciptanya lingkungan yang mendukung kebijakan, peningkatan ekonomi masyarakat dan mendukung sosial kebudayaan masyarakat setempat.

1.8. Penutup

1.8.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pajak Reklame di Kota Pekanbaru dengan menggunakan indikator implementasi yang terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, Agen pelaksana, sikap pelaksana, Komunikasi dan Lingkungan, maka didapatkan hasil penelitian serta dapat disimpulkan pelaksanaan Program pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pajak Reklame di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik, maka dapat disimpulkan Implementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pajak Reklame di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

Dengan kurang berjalannya pelaksanaan Program pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pajak Reklame di Kota Pekanbaru tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat kinerja dari pihak terkait itu sendiri. Hal yang menghambat yang peneliti dapatkan dilapangan adalah:

1. Sumber daya manusia

Luasnya wilayah kota pekanbaru yang tidak disesuaikan dengan penyediaan sumber daya manusia atau staff pengawas objek reklame atau petugas yang melaksanakan

sosialisasi maka akan menghambat pelaksanaan program pengelolaan pajak reklame hal tersebut juga harus di barengi dengan fasilitas-fasilitas operasional lainnya.

2. Lingkungan

Faktor lingkungan khususnya kondisi ekonomi saat ini yang masih dalam masa pandemi menjadikan kegiatan masyarakat, usaha maupun sektor ekonomi lainnya menjadi menurun hal tersebut berdampak juga pada usaha reklame yang mengalami penurunan omset sehingga wajib pajak reklame menjadi kekurangan pendapatan dan terdapat penunggakan pajak reklame,

3. Wajib pajak

Masih banyaknya wajib pajak yang tidak tertib dan taat dalam membayar pajak reklame sehingga target pajak reklame yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi.

1.8.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka dapat di sarankan beberapa hal antara lain:

- a. Kepada pihak Badan Pendapatan Kota Pekanbaru harus menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia atau staff pengawas objek reklame atau petugas yang melaksanakan sosialisasi dengan luasnya wilayah kota pekanbaru untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan pajak reklame hal tersebut dan

juga harus dibarengi dengan menambah fasilitas-fasilitas operasional lainnya.

- b. Kepada Badan Pendapatan Kota Pekanbaru untuk membuat kebijakan, strategi maupun program yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang masih dalam masa pandemi sehingga dapat meringankan wajib pajak dengan kondisi saat ini.
- c. Kepada wajib pajak untuk tertib dan taat dalam membayar pajak reklame sehingga target pajak reklame yang telah ditetapkan dapat terealisasi dan juga mendukung pembangunan daerah

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zairul Said. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

Adriyanti, Gita. 2016. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan (Simpat) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara

Agustinus, Sony dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Agustino, Leo. (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

- Alam dan Faried. (2012). Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Chayadi, Yudi. 2014. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Klasifikasi Kecil Pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak. Tesis. Universitas Islam Riau
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Friedrich. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
- Ikbar, Yanuar. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT. Refika Aditama.
- John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr., (2008). *Manajemen Strategis. Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Kurnia Maria. 2020 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Jurnal Eksekutif Volume 2 No. 5 Tahun 2020 Universitas Sam Ratulangi
- Kuswartojo, Tjuk. (2010). Perumahan dan Permukiman di Indonesia; Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan. Bandung: ITB.
- Maula, Fahiem Huda (2012) . Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Dinas Pasar Kota Malang) Thesis, Universitas Brawijaya
- Mursalin Yahya. (2014) Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat. Universitas Teuku Umar
- Mazali, Amri. (2012). Antropologi Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Ewan Agus. (2012). Impelementasi Kebijakan Publik. Konse, dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, Urip. (2014). Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana.
- Solihin, Ismail. (2011). Penghantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono. (2012). Analisis Kebijkan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin (2014), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta

Usman, Akbar. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahab, Abdul Solichin. (2014). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.